

**EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TANAH KAS
DESA KEPENUHAN RAYA (Studi Kasus Nomor : 58/Pid.Sus
TPK/2023/PN.Pbr)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:

HERLINDA SARI YANTI

NIM. 2435046

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Evaluasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Tanah Kas Desa Kepenuhan
Raya (Studi Kasus Nomor : 58/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Pbr)

SKRIPSI

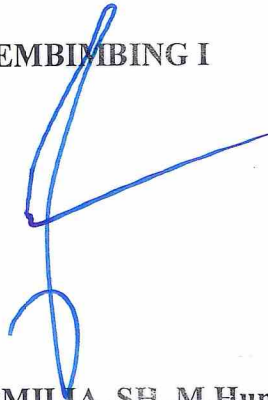
*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN



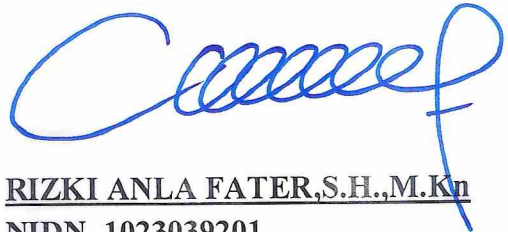
HERLINDA SARI YANTI
NIM. 2435046

DOSEN PEMBIMBING I



RISE KARMILIA, SH., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

DOSEN PEMBIMBING II



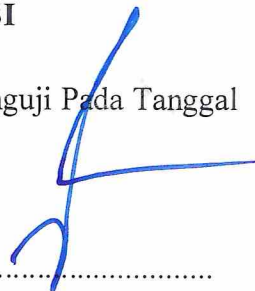
RIZKI ANLA FATER, S.H., M.Kn
NIDN. 1023039201

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

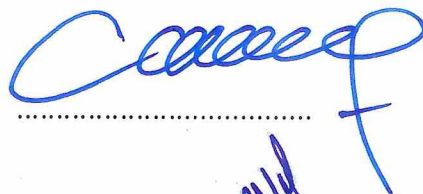
Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal
14 Bulan Agustus Tahun 2025.

Tim Penguji Skripsi

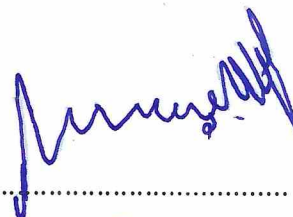
Ketua : Rise Karmilia, SH.,M.Hum.,Ph.D



Sekretaris : Rizki Anla Fater, SH.,M.Kn



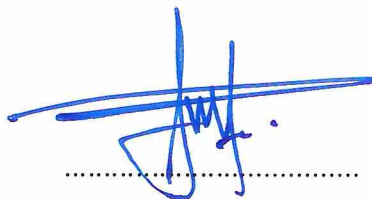
Anggota I : Hendri, SH.,MH



Anggota II : Almadison, SH.,MH



Anggota III : Romadhon, SH.,MH



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Herlinda Sari Yanti

NIM : 2435046

Bidang/Jurusan : HUKUM PIDANA

No. HP : -

Judul Skripsi : Evaluasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Tanah Kas Desa
Kepenuhan Raya (Studi Kasus Nomor : 58/Pid.Sus-
Tpk/2023/Pn.Pbr

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 15 Juli 2025

Yang Menyatakan,


HERLINDA SARI YANTI
NIM. 2435046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyimpangan dan penggelapan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) serta bagaimana proses pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku, khususnya di Desa Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu. Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan TKD tanpa transparansi, prosedur hukum, serta tidak dicatat dalam APBDes mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana dan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data dari aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Teori yang digunakan meliputi Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Moral-Individual, Teori Formil, Teori Materiil, dan Teori Kepercayaan (*Vertrouwensbreuk*). Hasil kajian menunjukkan bahwa kepala desa sebagai pejabat publik bertanggung jawab secara pidana secara individual atas tindakan korupsi dan penggelapan yang dilakukannya, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatannya. Selain itu, terdapat kelalaian administratif yang turut menyebabkan kerugian negara. Penegakan hukum terhadap pelaku menjadi penting dalam menjaga integritas jabatan publik dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pengawasan keuangan desa dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa.

Kata kunci: Tanah Kas Desa, Kepala Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Kepercayaan Publik.

ABSTRACT

This study aims to examine the forms of irregularities and embezzlement committed by village heads in the management of Village Treasury Land (TKD) and how the criminal accountability process is applied to perpetrators, particularly in Kepenuhan Raya Villages, Rokan Hulu Regency. The abuse of authority by village heads in managing TKD without transparency and legal procedures, and without being recorded in the Village Budget (APBDes), indicates a violation of criminal law and village financial management regulations. This study uses a normative juridical method with an empirical juridical approach, through an analysis of applicable laws and regulations as well as data from law enforcement officials and the local community. The theories used include the Theory of Criminal Responsibility, the Moral-Individual Theory, the Formal Theory, the Material Theory, and the Theory of Trust (Vertrouwensbreuk). The results of the study indicate that village heads, as public officials, are individually criminally responsible for their acts of corruption and embezzlement, and there is no justification or excuse for their actions. Furthermore, there were administrative negligence that contributed to state losses. Law enforcement against perpetrators is crucial to maintaining the integrity of public office and public trust. This research is expected to contribute to strengthening village financial oversight and preventing corruption at the village government level.

Keywords: *Village Treasury Land, Village Head, Corruption, Criminal Accountability, Public Trust.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul " **EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEPENUHAN RAYA (Studi Kasus Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr**

Proposal skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Sekaligus Pembimbing I yang memberikan banyak saran dan masukan terhadap proposal ini.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Rizki Anlafater , S.H, M.Kn selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
7. Kepada Keluarga tercinta terima kasih sudah mensupport untuk sejauh ini.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh

karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 06 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Negara secara Sukarela (<i>Voluntary Asset Recovery</i>)	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
2.2.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
2.2.3 Subjek Pertanggungjawaban : Kepala Desa sebagai Subjek Hukum Pidana	26
2.2.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik (Kepala Desa).....	27
2.2.5 Relevansi dalam Hukum Positif	36

2.3	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	37
2.3.1	Pengertian Korupsi	37
2.3.2	Teori-Teori Korupsi	37
2.3.3	Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	39
2.3.4	Ciri-Ciri Khusus Tindak Pidana Korupsi.....	40
2.3.5	Relevansi Teori Korupsi dalam Konteks Kepala Desa.....	41
2.4	Tinjauan Umum tentang Penggelapan dalam Hukum Pidana	41
2.4.1	Pengertian Penggelapan.....	41
2.4.2	Unsur-Unsur Penggelapan	42
2.4.3	Jenis-Jenis Penggelapan dalam KUHP	43
2.4.4	Teori-Teori Penggelapan	44
2.5	<i>Good Governance</i> dan Pemerintahan Desa	49
2.5.1	Pengertian <i>Good Governance</i>	49
2.5.2	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	50
2.5.3	Fungsi <i>Good Governance</i> dalam Pemerintahan Lokal.....	51
2.6	Pemerintah Desa	51
2.6.1	Kedudukan Pemerintahan Desa	51
2.6.2	Wewenang Kepala Desa.....	52
2.6.3	Aset dan Keuangan Desa dalam Bingkai <i>Good Governance</i>	52
2.7	Relevansi <i>Good Governance</i> dalam Pencegahan Korupsi Desa	53
2.8	Tinjauan Yuridis terhadap Aset Desa (Tanah Kas Desa/TKD)	53
2.8.1	Definisi Aset Desa.....	53
2.8.2	Tanah Kas Desa.....	54
2.9	Landasan Yuridis Pengelolaan TKD	54
2.10	Tinjauan Hukum tentang Aset dan Kekayaan Desa.....	55

2.11 Tinjauan Masalah Yuridis dalam Pengelolaan TKD	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Lokasi Penelitian.....	59
3.3 Sumber Data	60
3.4 Narasumber	63
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	63
3.6 Populasi dan Sampel	66
3.7 Definisi Konseptual.....	67
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	69
4.1 Apa Saja Bentuk Bentuk Penyimpangan dan Penggelapan yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terkait Pengelolaan Tanah Kas Desa (Tkd) Di Dua Desa Tersebut.....	69
4.2 Bagaimana Proses Hukum yang Dilakukan Terhadap Kepala Desa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Tkd) Di Dua Desa	76
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN